

PERSEPSI MASYARAKAT NAGARI KASANG TERHADAP PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG PEKANBARU (PADANG-SICINCIN)

Andra Fahmi^{1(a)}, Nora Eka Putri^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}andrafahmi2304@gmail.com, ^{b)}noraekaputri@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

15-02-2021

Selesai Revisi:

15-04-2022

Diterbitkan Online:

18-04-2022

Kata Kunci:

Persepsi, Pembangunan
Infrastruktur, Pengadaan
Tanah

Keywords:

Perception, Infrastructure
Development, Land
Acquisition

Corresponding Author:

andrafahmi2304@gmail.com

ABSTRAK

Dari tinjauan lapangan kajian ini punya tujuan mengenali anggapan warga nagari kasang terhadap pengadaan tanah pembangunan jalur Tol Padang Pekanbaru (Padang-Sicincin). Analisis ini melatar belakangi intensitas pemangku kebijakan melakukan penyediaan lahan ini secara baik biar tidak terdapat pihak yang akan merasa dikhianati paling utama warga. Tetapi, penerapan untuk membebaskan lahan di Nagari Kasang masih terjalin kasus ialah kecilnya harga yang ditawarkan oleh pemerintah kepada warga, kekurangan keberhasilan perundingan harga tanah oleh penguasa kebijakam dengan masyarakat serta Warga yang tanahnya tergusur terancam kehabisan mata pencarian. Kajian ini bertabiat kualitatif dengan tata cara deskriptif yang sudah dilaksanakan di Nagari Kasang kabupaten Padang Pariaman yang terserang dalam pembangunan jalur tol Padang- Pekanbaru (ruas Padang-Sicincin). Hasil riset ini menampilkan kalau anggapan warga telah diterima serta diberikan penafsiran dengan cara baik, pengadaan tanah telah dicoba cara terstruktur serta ubah rugi tanah telah dipaparkan kepada warga.

ABSTRACT

From the field review, this study aims to determine the opinion of Kasang Nagari residents on land acquisition for the construction of the Padang-Pekanbaru (Padang-Sicincin) Toll Road. This analysis is the background of the intensity of policy makers in providing this land properly so that no party feels betrayed, especially residents. However, the application for land acquisition in Nagari Kasang is still in the form of the low price offered by the government to the residents, the unsuccessful negotiation of land prices by the policy authorities with the community, and residents whose lands have been evicted. in danger of running out of livelihood. This research is qualitative with descriptive procedures that have been carried out in Nagari Kasang, Padang Pariaman Regency, which was attacked in the construction of the Padang-Pekanbaru toll road (the Padang-Sicincin section). The results of this study indicate that the residents' assumptions have been accepted and interpreted well, land acquisition has been attempted in a structured manner, and compensation for land losses has been explained to residents.



PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 2 ayat (2) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Penerapan dalam membangun Buat Kepentingan Universal. Perihal yang sangat berarti dalam pengadaan tanah buat kepentingan universal ini merupakan kelayakan posisi, buat membenarkan kalau posisi yang ditarget cocok dengan pembangunan yang hendak terbuat. Bila posisi yang ditarget telah pas, berikutnya merupakan ditaksir bayaran yang dibutuhkan buat ubah kerugian tanah. Tidak hanya posisi yang pas, pula sangat butuh dicoba analisa akibat area serta akibat sosial.

Perluasan pembangunan yang terus menjadi pesat di negara ini. hingga dari itu buat memesatkan perjalanan ekspedisi dari provinsi Sumatera Barat ke provinsi Riau dibentuk jalur tol yang dapat dengan jarak penempuhan 3 sampai 4 jam. Tetapi dari itu, memunculkan kasus di warga atas pembebasan tanah. Kecilnya harga yang ditawarkan dari pemerintah kepada warga dalam perundingan.

Perihal untuk ini menjadikan pemerintah belum sukses dalam perembukan dengan masyarakat yang tanahnya dipakai dalam pengadaan tanah. Dipandang dari berartinya pembebasan lahan pada yang baik di atas, pemerintah butuh melakukan pembebasan lahan dengan baik supaya tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan paling utama warga. Tetapi, penerapan dalam membebaskan lahan di Nagari Kasang saat itu masih terjalin kasus, sebab nilai ubah rugi yang dinegosiasi oleh pemerintah dikira sangat tidak nyata dinilai oleh warga. Sementara itu warga di wilayah Kasang kebanyakan mempunyai mata pencaharian dengan bertani. Pemerintah disini dikira kurang mencermati kerugian yang hendak dirasakan oleh warga.

Bersumber pada tinjauan lapangan banyak warga yang menolak terdapatnya pembangunan jalur Tol tersebut dengan bermacam alibi. Salah satunya merupakan harga yang ditawarkan sangat rendah apalagi merugikan warga setempat. Dan, ditemui kenyataan kalau pemerintah tidak melaksanakan perundingan langsung dengan warga. Kondisi seperti itu yang membuat masyarakat merasa di rugikan karena pemerintah mengambil keputusan secara sepihak.

Pembangunan jalan leluasa hambatan(jalur tol) terus hadapi kenaikan yang lumayan

signifikan di segala daerah Indonesia. Salah satu aspek pembangunan jalur tol berbentuk pengadaan tanah yang keberadaannya wajib diperhitungkan, ditimbang khasiatnya serta direncanakan dari segi ekonomi. Pembangunan jalur tol Padang- Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman telah lumayan baik terlaksana hingga dengan 4, 2 kilometer di Nagari Kasang, tetapi dalam prosesnya terkendala dengan upaya yang belum optimal sebab minimnya koordinasi serta komunikasi antar pihak yang ikut serta dalam proses pengadaan tanah (Ayu and Nora Eka Putri 2020).

Pembangunan jalur tol dari Padang- Sicincin ini nantinya hendak memunculkan debu, getaran, serta perlengkapan alat berat yang lalu melalang dalam proses pengerjaannya, ini jadi salah satu alibi warga tidak setuju dengan pembangunan jalur tol dicoba disitu, serta warga memohon kompensasi atas kerugian yang hendak didapatkan kala pembangunan itu dilaksanakan semacam membagikan pelayanan free buat masuk jalur tol, ataupun memperkerjakan warga sekitar pada saat proses pembangunan jalur tol. Hendak namun, sampai proses konstruksi ini menggapai angka delapan belas persen tidak satu juga warga terdampak yang sudah dipanggil buat bekerja disitu. Hambatan ini pastinya hendak memunculkan perdebatan antara warga dengan pihak pengurus pembangunan jalur tol (Urrahmi and Putri 2019).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang periset pakai dalam riset ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif. Posisi riset disekitar area Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman. Wilayah Nagari Kasang yang terdampak dari membangun jalur tol ini dari Padang- Pekanbaru (ruas Padang- Sicincin). Informasi yang dipakai dalam riset ialah informasi primer serta informasi sekunder. Pengumpulan informasi dengan metode wawancara.

Observasi serta dokumentasi serta uji keabsahan informasi memakai metode triangulasi. Sebaliknya metode analisis informasi dicoba dengan pengumpulan informasi, reduksi informasi, penyajian informasi. serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat

Keakraban pemerintah bersama warga ketika pengadaan tanah lumayan baik sampai-

sampai proses pengadaan tanah ini beroperasi dengan baik. Harga tanah sangat rendah yang di bagikan oleh pemerintah jadi hambatan oleh warga dikala diwawancarai oleh periset. Warga menunjang tata olah pembangunan jalur tol Padang- Pekanbaru ini, hendak namun warga tidak membenarkan harga yang diinformasikan oleh pemerintah sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selanjutnya.

Nagari Kasang ialah sesuatu wilayah yang dilintasi bagi pembangunan jalur tol Padang-Pekanbaru, yang bila mana dinagari kasang ini ialah sesi satu dari pembangunan jalur tol dari Padang-Pekanbaru ini. Jalur yang hendak dibentuk di Nagari Kasang ini sejauh empat koma dua kilometer. Memakai beberapa jorong dalam nagari ini. Jorong yang dilalui pembangunan jalur tol ini ialah Jorong Bintungan beserta Jorong Kasai.

Pengadaan tanah direncanakan oleh satuan petugas (SATGAS) yang mana harganya ditentukan oleh tim Appraisal. Pengadaan tanah di Nagari Kasang ini yang dilakukan yakni sesi satu yang diberikan oleh pemerintah wilayah kepada ATR/ BPN Padang Pariaman. Sesi satu ini dicoba sejauh empat koma dua kilometer dengan keseleruhan yang terletak di Nagari Kasang. Hingga dikala ini telah hingga sesi konsinyasi ialah dimana uangnya ditumpang ke majelis hukum bila warga ingin mengambil uangnya dapat langsung ke majelis hukum. Hendak namun bila terdapat yang ingin mengajukan permohonan untuk kenaikan harga ataupun tidak sepakat dari kesepakatan harga yang telah ditetapkan dimintta langsung ke majelis hokum untuk mengharapkan harga yang lebih masuk akal oleh pemilik lahan. Buat dikala ini telah terdapat sebelas orang yang telah mengambil uangnya secara langsung terdiri dari enam orang yang didistribusikan langusng kepada warga serta lima orang yang pergi ke majelis hukum untuk memungut uangnya dari pergantian tanah yang dilakukan. Buat dikala ini sudah tidak lagi terdapat hambatan dari pemangku kebijakan terhadap pengadaan tanah untuk membangun jalur tol. BPN sendiri masuk ke dalam sesi penerapan yang ialah SATGAS B yang menginventaris apa yang terdapat diatas tanah yang bersangkutan terhadap tanah yang hendak digunakan dalam pembangunan.

Konsinyasi ialah sesuatu persetujuan kedua bagian yang terlibat apabila satu pihak selaku owner benda mengikhlaskan benda terhadap pihak tertentu buat melego serta setelah itu

diberikan bayaran sesuai dengan tanah yang diambil. Pemerintah menjadi consignor disini, merupakan sisi penitipan ataupun penjualan benda ialah majelis hukum. Bila warga sepakat dengan harga yang sudah ditetapkan supaya mengambil uangnya ke majelis hukum. Hendak tetapi bila warga menolak harga penawaran. Warga mempunyai hak untuk mengacukan kembali harga baru. Terpaut dengan anggapan warga dengan pengadaan tanah warga. Hingga tampak sebagian anggapan oleh warga yang telah dinilai untuk membatasi lancarnya pembangunan yang sudah dikonsepkkan pemerintah sebagai pembangunan jalur tol dari padang pekanbaru (ruas jalur Padang- sicincin).

a) Kedekatan

Pembangunan jalur tol untuk dicoba dalam pemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah terhadap warga cuma terpaut khasiat dengan terdapatnya guna jalur tol di masa akan datang ataupun dimana nantinya sudah berjalan, dalam sosialisasi tersebut ataupun juga dalam aktivitas yang lain pemerintah tidak melaksanakan konvensi dengan warga terpaut ubah rugi lahan warga.

b) Kesamaan

Kasus utama dalam permasalahan ini merupakan tidak terpenuhinya kemauan warga yang memohon peningkatan ubah rugi tanah, perihal ini jadi kasus yang esensial hendak memperlamban proses pembangunan jalur tol, serta memperlamban pengoperasiannya. Aksi pemerintah yang terus melaksanakan pendekatan kepada warga terhalang dengan kemauan warga yang tidak dipadati.

c) Elemen yang dibatasi

Pendapat pemerintah serta warga jadi bahaya timbulnya kasus penolakkan, membatasi pengembangan daerah yang sepatutnya bekerja dengan mudah. Pemerintah masif terhadap penawaran yang sudah diresmikan serta mengandalkan kebijakan yang dirasa pantas untuk diberlakukan.

d) Pengelompokan

Menggunakan metode ini pemerintah dalam melaksanakan pengancangan untuk warga dengan awal mulanya bagi warga paham serta memperkenankan, tetapi balik lagi kasus penyesuaian harga tidak menciptakan konvensi, kasus menjadi berkepanjangan senantiasa

hendak jadi kasus utama yang hendak membatasi realisasi jalur tol.

Hambatan ketika pengadaan tanah pembuatan jalur tol Padang-Pekanbaru (ruas jalur Padang- Sicincin). Berbentuk penetapan harga tidak dirasa pantas dengan waktu diadakannya penetapan harga. lantaran kelompok appraisal menawar harga sangat rendah dari yang terjalin dikala ini dipasaran. Regu appraisal mengenakan nilai jual objek pajak dengan harga begitu rendah. Hingga maka semuanya warga sedang terdapat yang ambayar untuk lahannya dijadikan serta dibentuk buat jalur tol tersebut. Dari informasi yang terdapat saat ini, setelah itu mendapatkan sebanyak enam orang menarik uangnya lebih dulu melalui kelompok SATGAS B. Hendak namun terdapat pula yang mengacukan kembali harga ke majelis hukum buat penyesuaian permintaan.

Penerapan Pengadaan Tanah

Keakraban pemerintah pada warga saat pengadaan tanah lumayan rapi. Hendak namun pada saat pengadaan tanah ada kendala hambatan yakni harga tanah yang sangat didapatkan warga dengan harga rendah oleh pemerintah yang menjadikan warga berkeberatan pembebasan lahan selaku pembangunan jalur tol Padang-Pekanbaru (ruas jalur Padang-Sicincin). Bila warga sepakat dengan harga yang sudah ditetapkan supaya mengambil uangnya ke majelis hukum. Hendak tetapi bila warga tidak sependapat tentang harga. Warga diizinkan mengacukan kenaikan harga yang ingin diminta kepada pengadilan.

Harga awal yang tidak diterima oleh warga dengan keadaan saat tahun diberlakukan dinilai tidak efisien. Oleh sebab itu regu appraisal yang menawar harga sedemikian menyedihkan dari yang terhubung dikala pasaran tahun itu. Cara Regu appraisal memberikan harga dengan NJOP sangat rendah. Hingga sebab itu masih terdapat warga yang masih membantah buat tanahnya diganti rugi.

PENUTUP

Warga sudah menyepakati pembangunan jalur tol padang pekanbaru (ruas jalur Padang-Sicincin). Hendak namun warga memohon penambahan harga tanah yang diberikan pemerintah supaya dimahalkan lagi dari sebelumnya pada saat menolak. Manfaatnya supaya warga dapat mempergunakan duit tersebut buat tujuan lain dengann contohnya modal berdagang, ataupun juga membeli tanah

ditemmpat lain buat meneruskan kehidupan perekonomian. Buat dikala jika masih terdapat warga belum mengambil atau belum diberikannya ganti rugi karena belum sepakati kecocokan dengan pemerintah. Warga masih terdapat yang mengacukan peningkatan ke majelis hukum. Untuk warga jika sudah mendapatkan duit disebabkan luasnya lahan telah memakai uangnya buat mencari mata perekonomian lain dengan yang lebih baik dari tadinya menjadi petani ataupun pekerja harian.

Bersumber pada dari kesimpulan riset ini masih terdapatnya pendekatan yang belum disesuaikan oleh pemmerintah dengan warga terpaut pengadaan tanah pembangunan jalur tol. Pemerintah sepatutnya berikan penyuluhan yang lebih baik kepada masyarakat supaya dapat dimengerti serta diterima oleh warga. Terpaut harga ataupun juga guna pembangunan pula di informasikan kepada warga supaya tidak terjalin hambatan yang sungguh- sungguh pada setelah itu hari.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, Wahyu Putri Arifah, and Nora Eka Putri. 2020. "Implementasi Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin Dari Aspek Pengadaan Tanah." *Jurnal Niara* 13(2): 23–28.

Urrahmi, Miftah, and Nora Eka Putri. 2019. "Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang- Sicincin." *Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 1(4): 49–57.

Assyahri, Wahib, M. Fachri Adnan, and Adil Mubarak. 2018. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Kinerja BEM Dalam Melakukan Koordinasi Ormawa Selingkungan UNP." *JESS (Journal of Education on Social Science)* 2(2): 136.

kumparan.com. 2019. "Masyarakat Kasang Demo Tuntut Ganti Rugi Jalan Tol Padang-Pekanbaru." *kumparan.com*. https://kumparan.com/langkanid/masyarakat-kasang-demo-tuntut-ganti-rugi-jalan-tol-padang-pekanbaru-1548229637516235073?utm_source=kumMobile&utm_medium=copy-to-clipboard&utm_campaign=share&shareID=1pMEpAIYOFLf.

Mak Wai Kin. 2006. "Analisis struktur

kovarians Judul untuk indikator terkait kesehatan pada lansia di rumah dengan adanya fokus pada kesehatan subjektif ” 3(May): 58.

Negara, Undang-undang Dasar, Republik Indonesia, Undang-undang Dasar, and Tambahan Lembaran. 2012. “No Title.” (3).

Republik Indonesia. 1945. “Undang-Undang Dasar 1945.” 4(1): 1–12.